

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: PENGUKURAN DAN MANFAATNYA

Cut Rizky Nuraafiyah¹⁾, Syukriy Abdullah²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
email: cutrizkynuraafiyah23@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
email: syukriyabdullah@feb.unsyiah.ac.id

Abstract

This paper describes the measurement of Local Government Financial Performance which is an important influence for the community in good government performance. The government is asked to report the results of financial reporting whether the government is working efficiently, effectively and openly.

Keywords : Pengukuran Kinerja, Kinerja Keuangan Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah masih sulit diukur karena adanya perbedaan pendapat. Selain itu kebanyakan penelitian menjelaskan rasio-rasio keuangan yang biasa dipakai di sektor swasta atau bisnis. Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah agar menjadi daerah yang kuat dan mampu mengembangkan kebesarannya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah banyak membutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga membutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintahan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi kinerja dengan pembandingan kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terdapat laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui penggunaan informasi anggaran, ekonomi dan keuangan. Ada beberapa variabel dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu jumlah penduduk, jumlah anggota DPRD, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk melihat sejauh mana kualitas pengelolaan kinerja yang dilakukan.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Ada beberapa variabel dalam kinerja keuangan pemerintah seperti jumlah penduduk, besarnya angka penduduk, jumlah anggota DPRD, luas wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

2. TEORI

Teori sumber daya kognitif berpendapat bahwa pemimpin yang berpengalaman dan berpendidikan lebih cenderung menghasilkan rencana yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih baik daripada yang lain (Fiedler, 1986). Sejalan dengan pemikiran yang sama, teori kepemimpinan menyarankan "heterogenitas antara pencapaian pendidikan pemimpin penting dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dengan memiliki pemimpin yang lebih berpendidikan" (Besley et al., 2011, hlm. 205).

Avellaneda (2009) menggunakan latar belakang pendidikan dan pengalaman terkait pekerjaan untuk mengukur kualifikasi walikota. Dia berasumsi bahwa, "Pendidikan, misalnya, menghasilkan kepercayaan dalam pengambilan keputusan, dan kepercayaan ini meluas ke subalterns, yang mengakui kemampuan manajer mereka" (Avellaneda, 2009, hlm. 289). Asumsi ini sejalan dengan temuan Hambrick dan Mason (1984), yang mengemukakan hubungan antara pendidikan formal dan kinerja.

Konsep akuntabilitas sebelumnya adalah teori lembaga. Teori di lembaga yang lain dari sistem informasi dari itu perlu untuk memastikan bahwa pihak benar-benar melaksanakan layanan atau tujuan yang diinginkan oleh kepala (Gjesdal, 1981, p. 208,211).

3. PEMBAHASAN

Keuangan Daerah Lhokseumawe 2018

Perkembangan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2018 senilai 33.855.813.011,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2017 senilai 27.839.764.484,00. Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 51,60%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah adalah sebesar 4,52% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 7,41%.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2018 senilai 3.088.925.300,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2017 senilai 4.050.483.522,00. Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 4,71%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 0,41% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 1,31%.

c. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2018 senilai 5.100.912.333,00 sedangkan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2017 senilai 5.093.717.479,31. Kontribusi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 7,78%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 0,68% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,12%.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2018 senilai 25.573.316.133,60 sedangkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2017 senilai 26.002.294.618,54. Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 36% sedangkan

terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 3% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 5%

e. Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2018 senilai 29.125.797.441,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 45.470.527.507,00. Kontribusi Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 4,40%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 3,89% atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 6,82%.

f. Dana Perimbangan – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana Perimbangan- Dana Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam pada tahun 2018 senilai 3.553.182.577,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 3.795.459.091,00. Kontribusi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 0,54%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 0,47% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 37,20%.

g. Dana Perimbangan- Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum pada tahun 2018 senilai 459.628.037.000,00, sedangkan pada tahun 2017 senilai 459.628.037.000,00. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 69,39%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 61,33% pada tahun ini sama pendapatannya dari tahun sebelumnya.

h. Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus pada tahun 2018 senilai 93.948.851.900,00, sedangkan pada tahun 2017 senilai 135.319.889.183,00. Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 14,18%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 12,54% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 18,66%.

i. Dana Penyesuaian dan Otsus

Dana Penyusunan dan Otsus pada tahun 2018 senilai 53.113.862.465,00, sedangkan pada tahun 2017 senilai 150.851.536.719,00. Kontribusi Dana penyesuaian dan Otsus terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 8,02%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 7,09% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 11,68%.

j. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada tahun 2018 senilai 23.302.809.345,64, sedangkan pada tahun 2017 senilai 32.121.731.293,47. Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap Pendapatan Transfer adalah sebesar 3,52%, sedangkan terhadap keseluruhan Pendapatan adalah sebesar 3,11% atau peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,92%.

k. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah pada tahun 2018 senilai 20.114.160.000,00, sedangkan pada tahun 2017 senilai 20.547.760.000,00. Kontribusi Pendapatan Hibah dari Pemerintah terhadap Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah sebesar 95,26%, sedangkan terhadap keseluruhan pendapatan adalah sebesar 2,68% atau mengalami penurunan dari realisasi sebelumnya sebesar 97%.

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2018 sebesar Rp. 65.918.966.777,60 berarti kontribusi PAD terhadap Realisasi Pendapatan

Daerah sebesar 8,75%. dengan demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Pusat dan Provinsi dirasakan masih cukup besar yaitu sebesar 91,25%.

l. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2018 senilai 331.577.842.590,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 345. Kontribusi Belanja Pegawai terhadap Belanja Operasi sebesar 52,54% sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah 34,34% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 18,19%.

m. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2018 senilai 113.393.566.135,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 99.778.405.287,00. Kontribusi Belanja Barang terhadap Belanja Operasi adalah sebesar 17,97% sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer sebesar 14,62% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,34%.

n. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2018 senilai 7.607.600.000,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 59.425.825.773,00. Kontribusi Belanja Hibah terhadap Belanja Operasi sebesar 1,21% sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 0,98% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,22%.

o. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2018 senilai 77.200.312.90,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 31.466.213.809,00. Kontribusi Belanja Sosial terhadap Belanja Operasi adalah sebesar 12,23% sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer sebesar 9,96% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 2,28%.

p. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2018 senilai 101.336.724.357,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 109.323.295.018,00. Kontribusi Belanja Keuangan terhadap Belanja Operasi adalah sebesar 16,06%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 13,07% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 2,99%.

q. Belanja Modal – Tanah

Belanja Modal Tanah pada tahun 2018 senilai 10.603.444.709,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 7.657.161.155,00. Kontribusi Belanja Modal Tanah terhadap Belanja Modal adalah sebesar 7,41% sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer sebesar 1,37% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 6,04%.

r. Belanja Modal – Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2018 senilai 19.852.800.393,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 23.572.905.862,00. Kontribusi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terhadap Belanja Modal adalah sebesar 13,88% sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 2,56% atau mengalami penurunan dan realisasi tahun sebelumnya sebesar 11,32%.

s. Belanja Modal – Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2018 senilai 15.988.789.318,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 44.348.598.500,00. Kontribusi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terhadap Belanja Modal adalah sebesar 11,17% sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 2,06% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 9,11%.

t. Belanja Modal- Bangunan Air, Jalan , Jembatan , Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Bangunan Air, Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2018 senilai 92.570.227.652,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 147.877.598.738,00. Kontribusi Belanja Modal Bangunan Air, Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan terhadap Belanja Modal adalah sebesar 64,70% sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 11,94% atau mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 52,76%.

u. Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018 senilai 4.067.136.084,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 138.254.500,00. Kontribusi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terhadap Belanja Modal adalah sebesar 2,84%, sedangkan terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 0,52% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 2,32%.

v. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga pada tahun 2018 senilai 308.425.085,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 206.399.000,00. Kontribusi Belanja Tak Terduga terhadap Belanja Tak Terduga adalah sebesar 61,69%, sedangkan terhadap keseluruhan belanja dan transfer sebesar 0,04% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 61,65%.

w. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada tahun 2018 senilai 973.164.381,00 sedangkan pada tahun 2017 senilai 928.342.379,00. Kontribusi Belanja Transfer Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa terhadap keseluruhan Belanja dan Transfer adalah sebesar 0,13% atau mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 5 %.

4. KESIMPULAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah masih sulit diukur karena adanya perbedaan pendapat. Selain itu kebanyakan penelitian menjelaskan rasio-rasio keuangan yang biasa dipakai di sektor swasta atau bisnis. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga membutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintahan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi kinerja dengan pembandingan kerja dan pelaksanaannya. Salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui penggunaan informasi anggaran, ekonomi dan keuangan. Ada beberapa variabel dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu jumlah penduduk, jumlah anggota DPRD, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk melihat sejauh mana kualitas pengelolaan kinerja yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sadjiarto, Arja. (2004). *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No.2, Nopember 2000:138 – 150
- Mamogale, M. (December 2014). Financial Performance of Local Government in Limpopo Province, 2010-2012. *African Studies Quartely Volume 15, Issues 1*.
- Reck, L. J. (2001). The Usefulness Of Financial and Nonfinancial Performance Information In Resource Allocation Decisions. *Journal of Accounting and Public Policy 20 (2001) 45 -71* .
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2018). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda*.
- Gomes, C. R., Alfinito, S., & Albuquerque, P. M. (2013). Analyzing Local Government Financial Performance : Evidance from Braziluan Municipalities 2005 - 2008. *RAC, Rio de Janeiro, v. 17, n. 6, art. 4, pp. 704-719, Nov./Dez. 2013*.
- Sadjiarto, A. (Nopember 2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2*.
- Zafra, J. L., Agustin, H. B., & Lopez Hernandez, A. M. (March 2009). Evaluating Financial Performance in Local Government : Maximizing The Bencmarking Value. *International Review of Administrative Sciences*.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. (21 Mei 2019). *10.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019*.